

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat studi hukum UII, 2004)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Dadang Solihin and Dedy Bratakusuma Supriyadi, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Eko Hariyanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- H .A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Ian Worotikan, *Otonomi Daerah: Peluang Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ridwan HR. "*Hukum administrasi Negara*",(Jakarta: Rajawali Pers2016, cet: XII)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2010)
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Suryaningrat, Bayu, *Sejarah Pemerintahan Di Indonesia, Babak Hindia Belanda Dan Jepang*, (Jakarta: Dewaruci, 1981)
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI* (Jakarta: LIPI Press, 2004)

Artikel Jurnal

- Abdul Rokhim, 'Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, XIX.36 (2013), 136–48.
- Abrianto, Bagus Oktafian, and Samuel Dharma Putra Nainggolan. "Kebaharuan Perizinan Berusaha Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 57–71.
- Alam, Kodrat, Fadjrין Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharman Lumban Tungkup, and Miran Miran, 'Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3.7 (2022), pp. 1119–28, doi:10.36418/jiss.v3i7.675.
- Aneta, Asna, 'Perkembangan Teori Administrasi Negara', *Jurnal Inovasi*, 9.1 (2020), pp. 1–24
<<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/view/703%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/download/703/647>>
- Arfan Faiz Muhlizi, *Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Rechts Viding Vol 1 No, 1 (Januari-April 2012) Kepala Sub Bidang Fasilitas Jabatan Fungsional Penelitian Hukum dan Penelitian PUSLITBANG BPHN Kementrian Hukum Dan HAM RI, h.97.
- Arrizal, Nizam Zakka, 'The Enforceability Force Majeure ' s Clause In Performance Of Business Contracts During Pandemic Covid-19 In Indonesia', *2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS 2020) The*, 499.Icolgas (2020), pp. 409–17

Arrizal, Nizam Zakka, Lanny Ramli, Samuel Dharma Putra, Hezron Sabar Rotua, Jamalum Sinambela, Universitas Airlangga, *and others*, 'Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020', *Jurnal Hukum Bisnis*, 12.1 (2023), pp. 1–10

Arrizal, Nizam Zakka, Siska Diana Sari, Sulistya Evingrum, Bintang Ulya, Yudita Ayu, Widya Perdana, *and others*, 'Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered)', 2024 (2024), pp. 191–202, doi:10.18502/kss.v9i6.15267

Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Desertasi untuk Gelar Doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993 dan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, UI, Jakarta, 1995.*

Cut Sabina Anasya Zulkarnaina, *and* Maret Priyantab. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 416–431. <http://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/166>.

- Eviningrum, Sulistya, *and* Arief Budiono, 'Harmonization Of Government Bureaucracy To Realize Good Governance', *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2022), pp. 29–46
- Fatanen, Ary. "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Cipta Kerja." *Khazanah Hukum* Vol.3, no. 1 (2020): 1–7.
- Fitri, Winda, *and* Luthfia Hidayah, 'Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan', *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.2 (2021), pp. 725–35, doi:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>
- Gunas, Tobias, 'Kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja, AWK, Linguistik Forensik Dari Pendekatan Analisis Wacana Kritis', *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 2021, pp. 390–96
- Handriana, Ricky, *and* Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142–152.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesaatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2).
- Humaira, Nabila Zulfa, 'Penerapan Omnibus Law Dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.2 (2021), pp. 462–68, doi:<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1989>

- Kasim, Jamal, Ali Sadikin, Desi Pulungan, Devi Rakhmatika, Agustiar, and Christine Nhazzia Agustine. “Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kerja,” no. 11 (2020): 304–313
- Kesuma, D. “Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work).” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 9, no. 1 (2023): 91–98.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/5220/2430>.
- Kharisma, Bintang Ulya, and Sofyantoro, ‘Penyandang Disabilitas Dan Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.2 (2020), pp. 85–98
- Madelene, Michelle Lucky, Jinner Sidauruk, and Debora. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm.” *Nommensen Journal of Business Law* 01, no. 01 (2022): 32–46.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum->.
- Miran, Miran, Doharman Lumban Tungkup, Fadjrin Wira Perdana, Irwan Irwan, jenisand Joko Setiono. “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Dan Politik.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 8 (2022): 1179–1185.
- Mustikarini, Indriyana Dwi, ‘Transformasi Kebijakan Pekerjaan Dan Penghidupan Layak: Kajian Literatur Tentang Upaya Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja’,

- EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4.2 (2023), pp. 2767–78, doi:10.62775/edukasia.v4i2.669
- Namlis Ahmad, ‘Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah’, *Kajian Pemerintahan*, IV Nomor 1 (2018). h. 5
- Narindra, Janitra Syena, and Budi Ispriyarso. “Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 418–432
- Prasasti Annisa Ayudya, ‘*Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang No11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*’ (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)., h. 2
- Prasetio Teguh, ‘Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja’, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2, (2021) h, 4
- Prastyaningrum, Ihtiari, Denny Hardiyanto, and Indriyana Dwi Mustikarini, ‘Developing Mushroom MSMEs (Micro , Small , and Medium Enterprises) in Mangirejo Hamlet to Facilitate Community Empowerment in Maintaining Economic Stability’, *Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Untuk Masyarakat*, 02.01 (2024), pp. 31–39
- Putra Pradana Disantara and Dkk, ‘Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja’, *Law Review*, XX, No 2.November (2021), 23.
- R.H Suend Saragih, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMK-*

- M) *Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*
(Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021).
- Rishan, Idul, and Imroatun Nika. “Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 166–188.
- Sani Safitri, ‘Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia’, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No (2019), 82.
- Sari, Siska Diana, ‘Violation Of Patient’s Legal Rights In Aesthetic Beauty Clinic’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), pp. 155–77
- Shandy, Nabila Alif Radika, and Allan Fatchan Ghani Wardhana. “Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114.
- Sulistyanto Luhukay, Roni, ‘Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja’, *Jurnal Meta Yuridis*, 1, 2021, pp. 100–122, doi:10.26877/10.26877/jm-y.v4i1.7827
- Sulistyanto Luhukay, Roni. “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.” *Jurnal Meta Yuridis* 4, no. 1 (2021): 100–122
- Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja’, *Simbur Cahaya*, 28.2 (2021), pp. 97–111, doi:10.28946/sc.v28i2.902

Suryati, Ramanata Disurya, *and* Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111.

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/902>.

Suwandi Arham, ‘Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, *Petitung*, Vol. 7, No (2019), 117.

Syakhila, Hindun Dias, Sekar Rani, *and* Karin Auliya Prasetyo, ‘Proses Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun Pasca Pandemi Covid-19’, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023

Tohadi. “Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 125–141

Website

DA, Ady Thea, ‘Prof Maria Ingatkan Pembentukan UU Dengan Omnibus Law Harus Tema Sama’, *Hukumonline*, 2023
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-maria-ingatkan-pembentukan-uu-dengan-omnibus-law-harus-tema-sama-lt6412de76c9ee7/>>

Ditjen PP. Kemenkumham.go.id, *Undang-undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara*, Artikel Hukum Administrasi Negara.

‘Peraturan Perundang-Undangan’ <<https://peraturan.bpk.go.id/>>

Perundang-Undangan

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik, *and* Presiden Republik Indonesia,

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah’, 2014, pp. 1–23

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang’, *Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia*, 176733, 2023, pp. 1–1127

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik, Administrasi Pemerintahan, *and*

Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601)’, 292, 2014

Majelis Permusyawaratan Rakyat, ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945’, 2000, pp. 1–28

<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>